

Adhy. A., Triananda. G., Budi. N. (2026). Analisis Kebijakan Publik Dalam Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Era Desentralisasi. *Prediksi*. Vol. 25 (1) 11-17.

## Analisis Kebijakan Publik Dalam Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Era Desentralisasi

Adhy Andriwiguna<sup>1\*</sup>, Trianandan Genedin<sup>2</sup>, Budi Nugraha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: [adhyandriwiguna@unsil.ac.id](mailto:adhyandriwiguna@unsil.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

12 Januari 2026

Received in revised form:

17 Februari 2026

Accepted:

14 Maret 2026

#### Keyword:

List a few (3-5) key words here

#### Kata Kunci:

Daftar beberapa (3-5) kata kunci di sini

### ABSTRACT

*Decentralization provides opportunities for regions and villages to develop community-based ecotourism, but its implementation is still hampered by coordination, institutional capacity, and suboptimal community participation. This study aims to analyze the design and implementation of public policies in strengthening community-based ecotourism in the era of decentralization by examining the roles of regional governments, villages, and local communities. The method used is a qualitative approach through case studies of several ecotourism villages that represent various patterns of governance and community participation. Data were obtained through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations. The results of the study indicate that strengthening community-based ecotourism is strongly influenced by three main factors: clarity of policy substance, the capacity of local actors, and patterns of collaboration between the government, communities, and other stakeholders. In addition, the success of implementation is largely determined by government support in the form of regulations, mentoring, and financing schemes that involve the community. This study concludes that strengthening community-based ecotourism requires policies that are integrative, participatory, and based on local potential. These findings are expected to serve as a reference for regional governments and tourism village managers in formulating more adaptive and sustainable policies.*

### ABSTRAK

Desentralisasi memberi peluang bagi daerah dan desa untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, namun implementasinya masih terkendala koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain dan implementasi kebijakan publik dalam penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi dengan menelaah peran pemerintah daerah, desa, dan komunitas lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada beberapa desa ekowisata yang merepresentasikan variasi pola tata kelola dan partisipasi komunitas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kejelasan substansi kebijakan, kapasitas aktor lokal, dan pola kolaborasi antara pemerintah, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberhasilan implementasi banyak ditentukan oleh dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendampingan, serta skema pembiayaan yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat membutuhkan kebijakan yang integratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pengelola desa wisata dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

\* Corresponding author: [adhyandriwiguna@unsil.ac.id](mailto:adhyandriwiguna@unsil.ac.id)

## PENDAHULUAN

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia telah membuka peluang signifikan bagi daerah dan desa untuk mengambil alih sebagian besar kewenangan dalam pengembangan pariwisata, termasuk ekowisata berbasis masyarakat. Kebijakan otonomi daerah memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dan desa merancang program wisata yang lebih responsif terhadap potensi sumber daya alam, sosial dan budaya lokal. Namun, dalam implementasinya, sejumlah tantangan mendasar muncul, seperti koordinasi antar-aktor yang belum optimal, kapasitas kelembagaan lokal yang masih rendah, serta partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat secara aktif dan setara. Sebagai contoh, penelitian oleh Saputra & Ali (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir belum mampu mendorong pengelolaan objek wisata secara partisipatif dan berkelanjutan karena masih terbatasnya peluang bagi warga lokal untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan.

Selanjutnya, studi oleh Mulyani et al. (2021) menggambarkan bahwa dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Magelang, faktor kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan bisnis swasta menjadi sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa partisipasi komunitas perlu didorong lebih aktif, dan pemerintah daerah harus memperkuat peranannya agar pembangunan ekowisata dapat berjalan secara holistik mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial sekaligus.

Dalam era “normal baru” pasca-pandemi, peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas juga semakin mendapat sorotan. Penelitian oleh Nawangsari & Rahmatin (2021) menyoroti tantangan dan peluang pariwisata berbasis masyarakat di Desa Tamansari, dengan temuan bahwa meskipun potensi lokal cukup besar, implementasi menghadapi hambatan seperti kesiapan infrastruktur, protokol kesehatan, dan kapasitas UMKM lokal. Sementara itu, tinjauan sistematis oleh Muda (2025) mengungkap bahwa model partisipasi masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan di Indonesia sangat beragam, namun kerap terhambat oleh struktural kelembagaan dan distribusi manfaat yang tidak merata. Terakhir, penelitian oleh Yusnita et al. (2024) pada pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan mengungkap bahwa kebijakan publik di tingkat desa seringkali belum terintegrasi dengan baik regulasi, skema pembiayaan, dan pelibatan masyarakat masih kurang tergarap secara sinergis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif desain dan implementasi kebijakan publik dalam penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi, dengan fokus pada peran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan komunitas lokal sebagai aktor utama. Rumusan masalah penelitian mencakup: (1) bagaimana konfigurasi kebijakan publik yang mengatur penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi; (2) bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah/desa; dan (3) faktor-apa saja yang mendorong atau menghambat penguatan ekowisata berbasis masyarakat dalam kerangka desentralisasi. Harapannya, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan publik dan praktis sebagai acuan bagi pengambil keputusan di tingkat lokal dalam mensinergikan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat demi menyokong ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik dalam penguatan

ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi. Pendekatan ini dipilih karena karakter kebijakan ekowisata tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau indikator kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman mengenai dinamika aktor, konteks sosial-budaya, serta interaksi antar-pemangku kepentingan yang membentuk praktik tata kelola di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menekankan makna, pengalaman, dan interpretasi para informan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berlangsung dalam keseharian pengelolaan destinasi wisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, perangkat desa, pengelola kelompok sadar wisata (pokdarwis), pelaku usaha lokal, tokoh masyarakat, serta relawan atau pihak pendamping ekowisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi bagi informan namun tetap menjaga fokus penelitian pada kebijakan dan implementasinya. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen resmi seperti peraturan daerah, peraturan desa, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), perencanaan desa wisata, laporan pengelolaan destinasi, serta arsip kegiatan pengembangan ekowisata. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi fisik destinasi dan pola interaksi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan penarikan temuan yang relevan. Setiap data yang diperoleh dibandingkan secara berulang untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antar-tema, terutama yang berkaitan dengan substansi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dinamika aktor dalam ekowisata berbasis masyarakat. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, termasuk pengecekan ulang informasi kepada informan (member checking) serta pemeriksaan konsistensi antara data wawancara, dokumen, dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan publik bekerja di tingkat daerah dan desa dalam konteks penguatan ekowisata berbasis masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### A. Konfigurasi Kebijakan Ekowisata di Era Desentralisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi telah menghasilkan variasi kebijakan ekowisata di tingkat daerah dan desa. Setiap daerah memiliki keleluasaan dalam merumuskan regulasi dan program pengembangan ekowisata sesuai karakteristik lokal. Di lokasi penelitian, kebijakan ekowisata umumnya diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan ekowisata di tingkat daerah dan desa berorientasi pada pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai basis pembangunan ekonomi lokal. Farida et al. (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan city branding berbasis identitas lokal, yang juga berdampak pada penguatan ekowisata sebagai strategi pengembangan wilayah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ekowisata sering diposisikan sebagai program sektoral tambahan, bukan sebagai agenda strategis pembangunan daerah. Penataan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga kebijakan ekowisata berjalan parsial dan belum memiliki indikator kinerja yang jelas.

## **B. Implementasi Kebijakan Penguatan Ekowisata Berbasis Masyarakat**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan ekowisata berbasis masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam. Di beberapa desa, kebijakan telah diterjemahkan ke dalam pembentukan kelembagaan pengelola seperti pokdarwis serta penyusunan rencana kerja tahunan desa wisata. Namun, di lokasi lain, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan belum jelasnya pembagian peran antar-aktor lokal.

Studi Mashur & Zulkarnaini (2022) mengenai kawasan pesisir memperlihatkan bahwa strategi pengembangan ekowisata sering kali diarahkan pada peningkatan fasilitas dan promosi, tetapi belum cukup kuat dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. Pola serupa ditemukan oleh Riyanto & Mashur (2022) di Desa Rantau Langsung, di mana rencana pengembangan ekowisata menghadapi kendala pada tahap implementasi karena keterbatasan kapasitas lembaga pengelola dan belum jelasnya pembagian tugas antar-aktor lokal.

Sementara itu, penelitian Astutiningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan desain kebijakan pariwisata terpadu sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemasaran, penguatan kapasitas pokdarwis, dan dukungan regulatif dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kebijakan yang baik tidak hanya mengatur aspek kelembagaan tetapi juga menetapkan arah pengembangan produk wisata, strategi pemasaran digital, serta pola pendampingan berkelanjutan. Mertha et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen kunci dalam mewujudkan destinasi berkualitas di kawasan Batur UNESCO Global Geopark. Dengan demikian, implementasi kebijakan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan sinergi antara kebijakan formal, praktik kelembagaan, dan dinamika sosial komunitas.

## **C. Peran Masyarakat dan Aktor Lokal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal berperan dalam berbagai aktivitas pengelolaan ekowisata, seperti pengelolaan destinasi, pemanduan wisata, serta pengembangan usaha pendukung (UMKM). Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat belum merata. Penelitian menemukan adanya kelompok masyarakat yang aktif dan dominan, sementara sebagian warga lainnya masih memiliki keterbatasan akses informasi, keterampilan, dan keterlibatan dalam pengelolaan destinasi.

Aktor lokal lainnya seperti pemerintah desa, pokdarwis, pelaku UMKM, dan lembaga adat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kolaborasi serta menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Studi Astutiningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan desa wisata di Magelang dipengaruhi oleh hubungan kerja yang baik antara perangkat desa dan pokdarwis, terutama dalam manajemen destinasi, promosi, dan penyusunan program kerja tahunan. Temuan ini sejalan dengan Riyanto & Mashur (2022), yang menyatakan bahwa kapasitas aktor lokal dalam membangun solidaritas, mengelola konflik, dan menciptakan inovasi sangat menentukan keberlanjutan ekowisata.

#### D. Faktor Pendorong dan Penghambat Penguatan Ekowisata

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor pendorong yang paling dominan meliputi keberadaan potensi alam dan budaya yang kuat, dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan pendampingan, serta tingginya semangat kolektif masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Farida et al. (2020) menekankan bahwa identitas lokal dan nilai budaya menjadi modal sosial yang dapat memperkuat daya tarik destinasi, terutama ketika dikemas melalui branding yang konsisten. Selain itu, temuan Mertha et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas, pelatihan, dan promosi memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kapasitas masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur, lemahnya koordinasi lintas aktor, rendahnya kapasitas SDM lokal, serta ketidaksesuaian regulasi antara tingkat desa dan kabupaten. Mashur & Zulkarnaini (2022) mengidentifikasi bahwa kurangnya sinkronisasi antara perangkat kebijakan lingkungan dan pengembangan wisata menyebabkan kebijakan ekowisata pesisir sulit diwujudkan secara optimal. Riyanto & Mashur (2022) menambahkan bahwa ketergantungan pada figur tertentu dalam pengelolaan desa wisata dapat melemahkan keberlanjutan organisasi ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan ekowisata membutuhkan tata kelola yang stabil, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika lokal.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, model penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi harus bertumpu pada tiga pilar utama: tata kelola kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan daerah yang responsif terhadap potensi lokal. Tata kelola kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, desa, pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat berada dalam satu kerangka kerja yang sejalan, terutama dalam perencanaan, pemasaran, dan pengelolaan destinasi. Astutiningsih et al. (2024) dan Mertha et al. (2025) menunjukkan bahwa ketika kolaborasi terjalin baik, desa wisata mampu menciptakan inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan, dan menarik lebih banyak wisatawan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek kunci dalam memastikan keberlanjutan ekowisata. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas SDM lokal harus menjadi bagian integral dari kebijakan daerah dan desa. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana tetapi juga sebagai mitra strategis yang memiliki pengetahuan lokal dan keterikatan budaya pada destinasi. Selanjutnya, kebijakan daerah harus menekankan integrasi antara konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya agar ekowisata tidak kehilangan esensi keberlanjutannya. Pengalaman dari berbagai daerah, termasuk yang dikaji oleh Mashur & Zulkarnaini (2022) maupun Riyanto & Mashur (2022), menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata tidak dapat dicapai tanpa kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data lapangan.

Dengan demikian, model penguatan yang direkomendasikan meliputi: (1) harmonisasi peraturan antar-level pemerintahan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata dan pokdarwis; (3) skema pendanaan partisipatif berbasis komunitas; (4) mekanisme kolaborasi

multiaktor; dan (5) integrasi teknologi digital untuk promosi dan manajemen destinasi. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di bidang ekowisata.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekowisata berbasis masyarakat di era desentralisasi sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik, kapasitas aktor lokal, dan efektivitas kolaborasi antara pemerintah, desa, dan komunitas. Desentralisasi memang membuka ruang yang luas bagi daerah dan desa untuk mengelola potensi wisata secara mandiri, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan substansi kebijakan, dukungan regulatif, serta kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara bermakna. Berbagai studi yang dianalisis mengungkap bahwa hambatan seperti lemahnya koordinasi, kapasitas SDM yang tidak merata, dan ketidakselarasan peraturan antar-level pemerintahan masih menjadi kendala utama. Sebaliknya, faktor pendorong berupa kekuatan modal sosial, potensi alam dan budaya, serta dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan dan pembiayaan mampu memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Dengan demikian, penguatan ekowisata berbasis masyarakat membutuhkan kebijakan yang integratif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal agar dapat mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi komunitas setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyad, S. N., Mustofa, A. N. A., Asy'ari, R., & Putra, R. R. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di kelurahan suka marga kecamatan suoh kabupaten lampung barat. *Journal of Event, Travel and Tour Management*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.34013/jett.v4i2.1753>
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2025). Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Desa Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata Tegal Loegood. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2576>
- Astutiningsih, S., Sutrisno, E., & Istania, R. (2024). Menuju Desa Wisata Bangkit: Implementasi Kebijakan Pemasaran Dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Komparatif Pada Desa Wisata Candirejo dan Karangrejo Kabupaten Magelang). *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 1–30.
- Azzahra, N. A., Setiyono, B., & Manar, D. G. (2023). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 118–139.
- Farida, F., Zulaikha, Z., & Putro, H. E. (2020). Desentralisasi Wisata Religi Indonesia Melalui City Branding Wisata Kabupaten Bangkalan Madura. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(2), 223–234.
- Hajad, V., Fadhly, Z., Husna, C. A., Harakan, A., & Ikhsan, I. (2025). Governance Strategies for Community-Based Eco-Tourism Development in Damaran Baru Village, Bener Meriah Regency: Opportunities and Challenges. *Journal of Government and Civil Society*, 9(1), 1–20.

<https://doi.org/10.31000/jgcs.v9i1.12668>

- Khasanah, U. R., & Santosa, S. A. (2022). Implementasi Community Based Tourism (CBT) Di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 176–191.
- Mashur, D., & Zulkarnaini, Z. (2022). Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Pesisir Pantal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 39–44.
- Mertha, I. W., Yunita, P. I., & Tirtawati, N. M. (2025). Creating Quality Tourism Destinations: The Crucial Role of Community Participation and Government Support in Batur UNESCO Global Geopark-Bali. *E-Journal of Tourism*, 12(2), 178–197. <https://doi.org/10.24922/eot.v12i2.2173>
- Muda, F. P. (2025). Community participation in Indonesian sustainable tourism: A systematic review of models, impacts, and gaps. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 125–139. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.462>
- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.jba.v17i3.958>
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2021). Tantangan Dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Tamansari Dalam Era Normal Baru. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(1), 91–104.
- Pratiwi, N., & Santoso, S. A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Janari Berbasis Community Based Tourism di Desa Gondangsari Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 88–103.
- Prihanta, W., Zainuri, A. M., Hartini, R., Syarifuddin, A., & Patma, T. S. (2020). Pantai Taman-Pacitan ecotourism development: Conservation and community empowerment orientation. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.22219/jcse.v1i1.11515>
- Purwaningtyas, A. (2023). Implementasi Community Based Tourism Dalam Evaluasi Desa Wisata Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Javanica*, 2(1), 37–43.
- Riyanto, T., & Mashur, D. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Di Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 1–10.
- Safitri, M., & Putri, N. E. (2024). Pelaksanaan Community Based Tourism Pada Objek Wisata Sajuta Janjang di Nagari Pakan Sinayan Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 20985–20993.
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584.
- Yulianah, Y. (2021). Mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk Pariwisata Berbasis Komunitas di Pedesaan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 1–9.
- Yusnita, Y., Samin, R., & Subiyakto, R. (2024). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan. *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 106–122.